



INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN

## KABUPATEN

## SOPPENG

# 2020





# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020



## Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020

Nomor Publikasi: 73120.2111  
Katalog BPS: 3205014.7312

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman: XIV + 40 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Gambar Kulit:  
Freepik  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Diterbitkan oleh:  
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dicetak oleh:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## TIM PENYUSUN

**Pembina:**

Paulus Mangande, SE

**Pengarah:**

Anny Arjumiati Anis, SE, MM

**Penulis:**

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

**Penyunting:**

S. A. Herdiana Putri, S. Stat.

**Desain Cover:**

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

**Desain Layout**

Muh. Faishal Nur Kamal, SST



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020”.

Publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020” berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2020.

Diharapkan publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020” dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.



PAULUS MANGANDE, KEPALA BPS KABUPATEN SOPPENG

Watansoppeng, Agustus 2021

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Soppeng

  
Paulus Mangande, SE  
NIP. 19640317 199202 1 001



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Katalog .....	iv
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan Penulisan .....	3
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN</b> .....	<b>5</b>
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan .....	7
2.2 Indikator Kemiskinan .....	9
2.3 Konsep dan Definisi Indikator Lain terkait Kemiskinan .....	10
<b>BAB III KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG</b> .....	<b>15</b>
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan .....	17
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin .....	20
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>29</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>37</b>



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	38
Tabel 2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	38
Tabel 3	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	38
Tabel 4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	38
Tabel 5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	39
Tabel 6	Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	39
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	39
Tabel 8	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Rastra/Raskin/BPNT dan Rata-Rata Berat Beras Rastra/Raskin/BPNT yang Diterima di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	39



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>




## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
<b>Gambar 1</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	18
<b>Gambar 2</b>	Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2016-2020	18
<b>Gambar 3</b>	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Soppeng, 2016-2020	19
<b>Gambar 4</b>	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	21
<b>Gambar 5</b>	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	22
<b>Gambar 6</b>	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	22
<b>Gambar 7</b>	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Informal dan Formal di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	24
<b>Gambar 8</b>	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Pekerjaan Non Pertanian dan Pertanian di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	25
<b>Gambar 9</b>	Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	26
<b>Gambar 10</b>	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Minum Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	27
<b>Gambar 11</b>	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Rastra/Raskin/BPNT dan Berat Rata-Rata Beras Rastra/Raskin/BPNT di Kabupaten Soppeng, 2016-2020	28
<b>Gambar 12</b>	Infografis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020	37



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

file:///C:/ppengkab.bps.go.id



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di tengah kekayaan potensi alamnya yang melimpah, ternyata Indonesia masih dihadapkan dengan sebuah masalah klasik, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun dan menjadi masalah yang belum terselesaikan saat ini. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di sinilah terdapat peran BPS, yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengumpulkan data-data kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Soppeng. Data kemiskinan yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan data-data mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng, maka BPS Kabupaten Soppeng menerbitkan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah Kabupaten Soppeng dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.

### 1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020.

- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020.

## 1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Sumber data yang digunakan adalah data yang dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016-2020 modul Konsumsi/Pengeluaran.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.

### BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

Bab ini berisi metodologi penghitungan kemiskinan, indikator kemiskinan, serta beberapa konsep dan definisi mengenai kemiskinan dan indikator kemiskinan.

### BAB III KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG

Bab ini menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Semua indikator di atas diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, akan dijelaskan kembali poin-poin penting mengenai fenomena kemiskinan di Kabupaten Soppeng sehingga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator-indikator kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.



# BAB 2

## KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

# **BAB 2 KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN**

## **2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan**

### **2.1.1 Konsep**

#### **1. Kemiskinan**

Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai deprivasi atau kekurangan atas kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif diartikan sebagai ketimpangan ekonomi, yang diukur dengan kelas pendapatan, antara kelompok masyarakat dengan kelas pendapatan terendah, menengah, dan tertinggi (Irawan, et al., 2017).

#### **2. Garis Kemiskinan**

Sebelum menghitung jumlah penduduk miskin, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

### **2.1.2 Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada periode tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, data

yang digunakan adalah data Susenas modul Konsumsi/Pengeluaran bulan Maret (semester I) yang jumlah sampelnya sudah mencukupi untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Sementara itu penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk tahun 2010 .

### 2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahapan dalam menghitung garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yaitu Garis kemiskinan pada periode lalu yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.
2. Tahap kedua adalah menentukan Garis Kemiskinan Makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan penjumlahan nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata per kilo kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya Garis Kemiskinan Makanan tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata per kilo kalori.
3. Tahap ketiga adalah menentukan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2003 (SPKKD 2003), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran



konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

4. Tahap terakhir adalah menghitung Garis Kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

## 2.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Foster, Greer, dan Thorbecke (1984, dalam Irawan, et al., 2017), ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut, baik dengan pengukuran berbasis pendapatan maupun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pengeluaran, yaitu:

1. *Head-Count Index* ( $P_0$ )

*Head-Count Index* ( $P_0$ ) adalah persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditentukan, atau disebut tingkat insiden kemiskinan. Indeks  $P_0$  hanya dapat memberikan informasi mengenai proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Keterbatasan indeks  $P_0$  adalah indeks ini tidak bisa menjelaskan seberapa miskin atau sengsara para penduduk yang dikategorikan miskin tersebut.

2. *Poverty Gap Index* ( $P_1$ )

*Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tidak seperti indeks  $P_0$  yang hanya memberikan informasi persentase dan jumlah penduduk miskin, indeks  $P_1$  bisa mengindikasikan perubahan derajat kemiskinan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks  $P_1$ , maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Namun, indeks  $P_1$  ini masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) antara penduduk miskin, sehingga tidak bisa mendeteksi keparahan kemiskinan (*poverty severity*).

3. *Poverty Severity Index* ( $P_2$ )

*Poverty Severity Index* ( $P_2$ ) merupakan indeks yang bisa memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ketiga indeks kemiskinan tersebut di atas bisa dihitung dengan menggunakan rumus FGT (Foster, Greer, Thorbecke) sebagai berikut.

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan:

- $z$  : garis kemiskinan
- $y_i$  : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$
- $q$  : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- $n$  : jumlah penduduk
- $a$  : parameter untuk ukuran sensitivitas kemiskinan ( $a = 0$  untuk menghitung  $P_0$ ,  $a = 1$  untuk menghitung  $P_1$ ,  $a = 2$  untuk menghitung  $P_2$ ).

## 2.3 Konsep dan Definisi Indikator Lain terkait Kemiskinan

### 2.3.1 Pendidikan

#### 1. Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SMP dan mempunyai ijazah minimal SMA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.

#### 2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf





penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

## 2.3.2 Ketenagakerjaan

### 1. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.

### 2. Bekerja di sektor informal

Bekerja di sektor informal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga/tidak dibayar.

### 3. Bekerja di sektor formal

Bekerja di sektor formal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama dengan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

### 4. Bekerja di sektor pertanian

Bekerja di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

## 5. Bekerja bukan di sektor pertanian

Bekerja bukan di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.

## 6. Tidak bekerja

Tidak bekerja adalah penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan Angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

### 2.3.3 Pengeluaran per Kapita

#### 1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

#### 2. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk makanan

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).

### 2.3.4 Fasilitas Perumahan

#### 1. Rumah Tangga Pengguna Air Layak

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

#### 2. Rumah Tangga Pengguna Jamban Sendiri/Bersama

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan.

### 2.3.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Rastri (sebelumnya disebut program Beras Miskin/Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban



pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

2. Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastrea) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Rastrea).
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

<https://soppengkab.bps.go.id>



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



[sippengkab.bps.go.id](http://sippengkab.bps.go.id)

# BAB 3

KONDISI  
KEMISKINAN  
KABUPATEN SOPPENG



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

## BAB 3 KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG

### 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

#### 3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang beribukota di Watansoppeng ini memiliki luas wilayah 1.500 km<sup>2</sup>. Seperti halnya kabupaten/kota lain, Kabupaten Soppeng juga menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan.

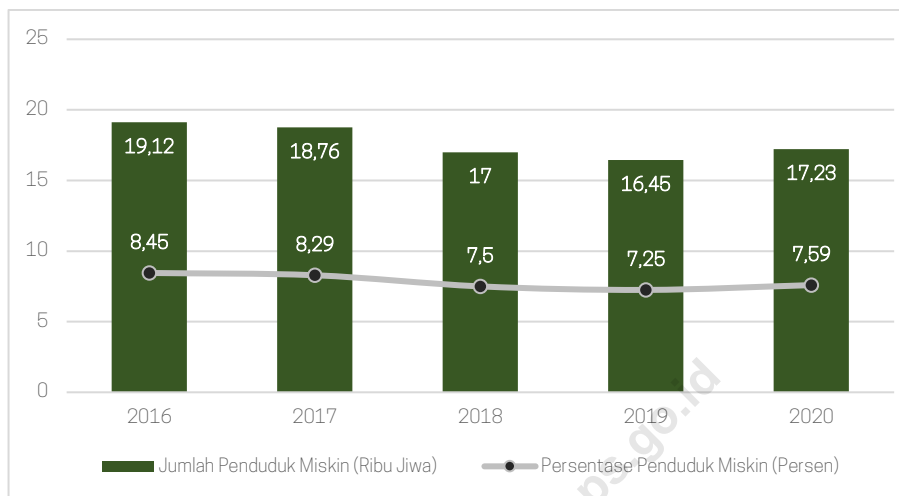
Fenomena kemiskinan secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator kemiskinan. Pertama, dengan melihat jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $P_0$ ). Kedua, dengan melihat rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan ( $P_1$ ). Ketiga, dengan melihat sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin ( $P_2$ ).

Pada tahun 2020, masih ada sekitar 17,23 ribu penduduk miskin di Kabupaten Soppeng atau sekitar 7,59 persen dari total penduduk Kabupaten Soppeng. Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp. 315.455/orang/bulan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, menurut Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin nomor tujuh paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling sedikit nomor delapan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020. Terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan menurun. Jika dilihat dari periode tahun 2016-2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 19,00 ribu jiwa menjadi 16,45 ribu jiwa, walaupun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 17,23 ribu jiwa. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) juga mengalami penurunan dari 8,45 persen menjadi 7,25 persen, walaupun mengalami kenaikan

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

di tahun 2020 menjadi 7,59 persen. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Soppeng yang mulai mewabah pada bulan Maret 2020.

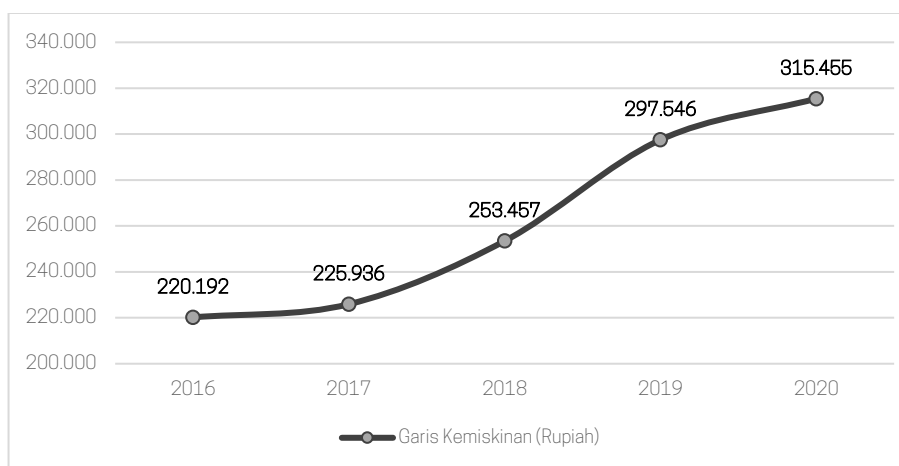


Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

## 3.1.2 Garis Kemiskinan

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai nilai Rp 315.455 /orang/bulan, angka tersebut merupakan angka garis kemiskinan paling tinggi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2016-2020

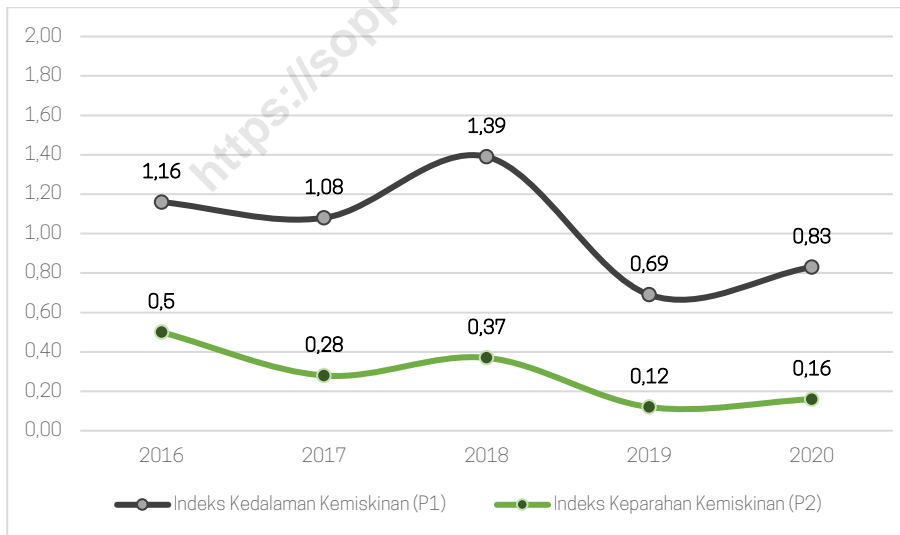
Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020



## 3.1.3 Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan

Indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah *poverty gap index* atau indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan *poverty severity index* atau indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ). Gambar 3 menjelaskan bahwa angka indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif dan mencapai angka 0,89 poin pada tahun 2020 dimana mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi pada  $P_2$  yang menunjukkan pola serupa dengan  $P_1$ . Walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2020 nilai  $P_2$  tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 0,16 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020, tidak terkecuali di Soppeng, tidak dapat dipungkiri memang menjadi pukulan bagi perekonomian masyarakat yang sedikit banyak mempengaruhi naiknya angka ketimpangan di Kabupaten Soppeng.



Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Kearifan Kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

## 3.2 Karakteristik Penduduk Miskin

### 3.2.1 Pendidikan

Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Todaro (2003, dalam Cahyo, 2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan.

Haughton dan Khander (2009) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi beberapa karakteristik, salah satunya adalah karakteristik sosial pada level rumah tangga dan individu. Karakteristik pendidikan, seperti tingkat pendidikan, ketersediaan pelayanan pendidikan, melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di atas lima belas tahun, menjadi salah satu karakteristik sosial yang menjadi penyebab kemiskinan.

Pada tahun 2020, banyak penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng dengan tingkat Pendidikan tidak tamat SD, yaitu 34,06 persen. Sementara itu penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tamat SD atau SMP ada sebanyak 45,42 persen, dan 20,52 persen lainnya berpendidikan tamat SMA ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng berpendidikan rendah dan hanya mampu menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SMP/Sederajat.

Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diketahui bahwa persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng berada pada peringkat 12 terbesar dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 34,06 persen. Sementara itu pada tingkat pendidikan tamat SD/SMP, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin yang hanya tamat SD/SMP berada pada peringkat 17 terbesar dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 45,42 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD lebih besar dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 32,86 persen dan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas berpendidikan tamat SD/SMP masih lebih rendah dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 48,76 persen.

Pada periode tahun 2016-2020, seperti yang terlihat pada Gambar 4, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas baik yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD atau SMP, maupun minimal tamat SMA, masih fluktuatif di tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD pada tahun 2020 mencapai

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

angka 34,06 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 49,22 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA mengalami kenaikan pada tahun 2020 persentasenya menjadi sebesar 20,52 persen lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai 8,64 persen. Hal ini menunjukkan membaiknya tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas selama kurun waktu 2016-2020.

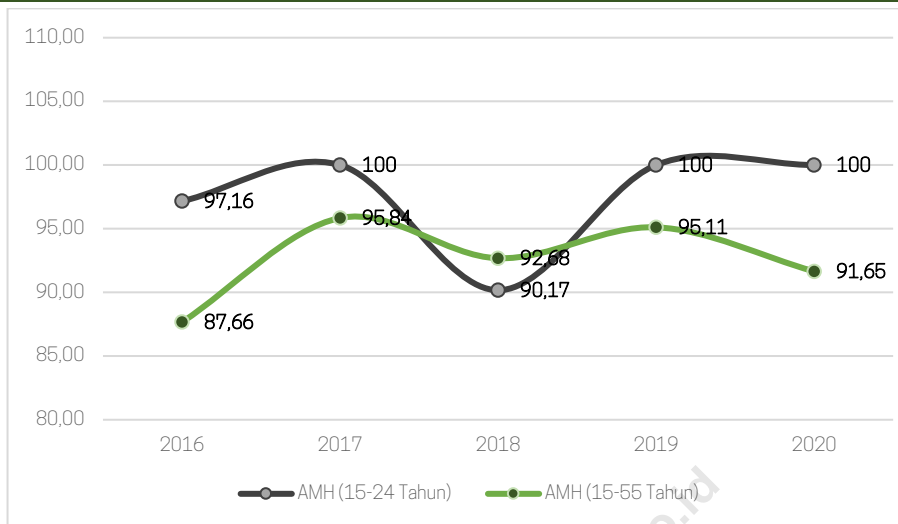


Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020  
Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah yang dibatasi pada penduduk miskin umur 15-24 dan 15-55 tahun untuk Angka Melek Huruf dan umur 7-12 dan 13-15 tahun untuk Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020.

Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf pada penduduk miskin golongan umur 15-24 tahun dibandingkan dengan golongan umur 15-55 tahun relatif lebih tinggi dari tahun ke tahun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, Angka Melek Huruf pada penduduk miskin golongan umur 15-24 tahun mencapai 100 persen yang artinya tidak ada penduduk miskin umur 15-24 tahun yang buta huruf, angka ini bertahan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 100 persen pada tahun 2019. Sementara itu pada penduduk miskin golongan umur 15-55 tahun, masih terdapat 8,35 persen yang buta huruf, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,89 persen pada tahun 2019.

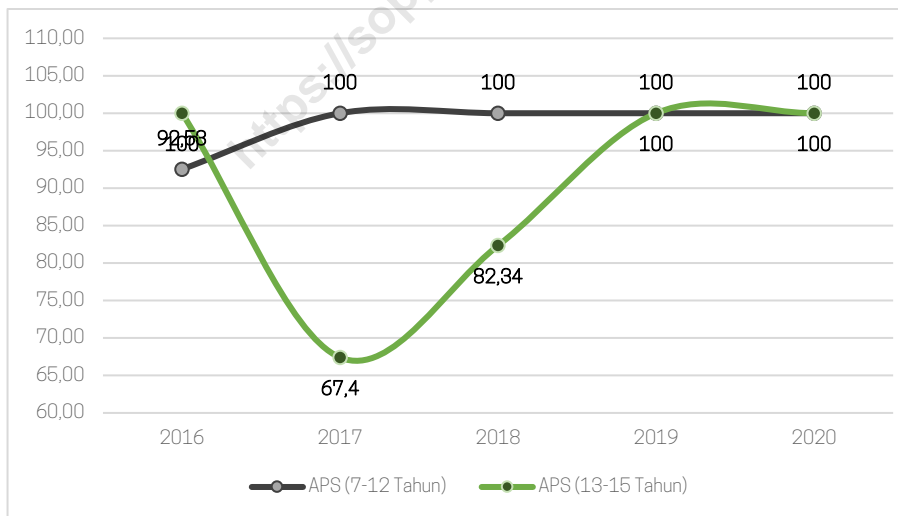
# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020



Gambar 5. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Gambar 6 berikut menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin menurut golongan umur 7-12 dan 13-15 tahun di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2020.



Gambar 6. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Jika dilihat dua tahun terakhir, rumah tangga miskin sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Bahkan persentase Angka Partisipasi Sekolah untuk golongan umur 7-12 tahun sudah mencapai

100 persen pada tahun 2019 dan 2020. Hal yang sama dapat diamati juga pada penduduk miskin golongan umur 13-15 tahun dimana persentase Angka Partisipasi Sekolahnya telah mencapai 100 persen pada tahun 2019 dan 2020.

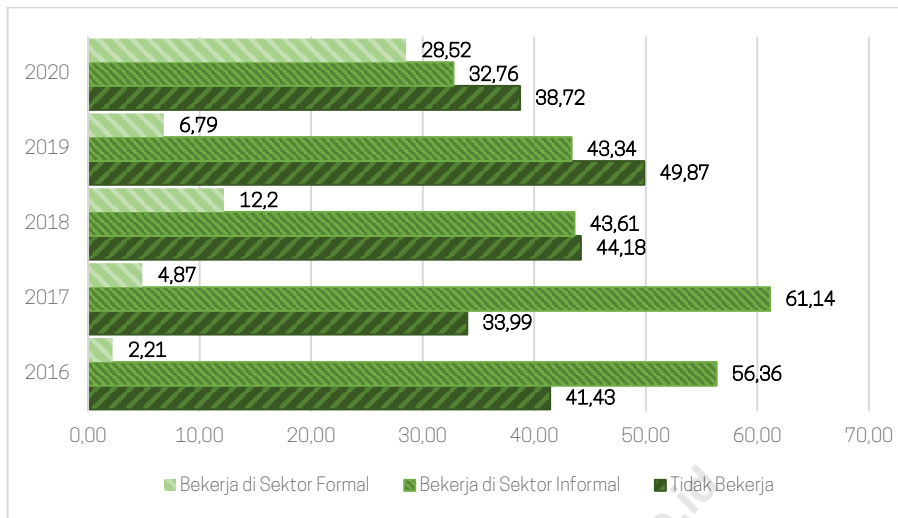
### 3.2.2 Ketenagakerjaan

Haughton dan Khander (2009) memasukkan karakteristik ekonomi pada level rumah tangga dan individu sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan. Karakteristik ekonomi tersebut salah satunya adalah permasalahan ketenagakerjaan. Dian Octaviani (2001, dalam Wijayanto 2010) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan Gambar 7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, penduduk miskin di Kabupaten Soppeng banyak bekerja di sektor informal. Hal tersebut dapat diketahui dari perbedaan antara persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal dan informal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 32,76 persen, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 28,52 persen.

Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, karakteristik penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng umumnya masih bekerja di sektor informal daripada bekerja di sektor formal, hanya segelintir orang saja yang bekerja di sektor formal yang angkanya tidak lebih dari 30 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran dari tahun ke tahun berfluktuasi mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi secara umum dalam tiga tahun terakhir persentasenya merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan penduduk miskin 15 tahun ke atas yang bekerja, baik di sektor informal maupun sektor informal dimana pada tahun 2020 persentasenya mencapai 38,72 persen.

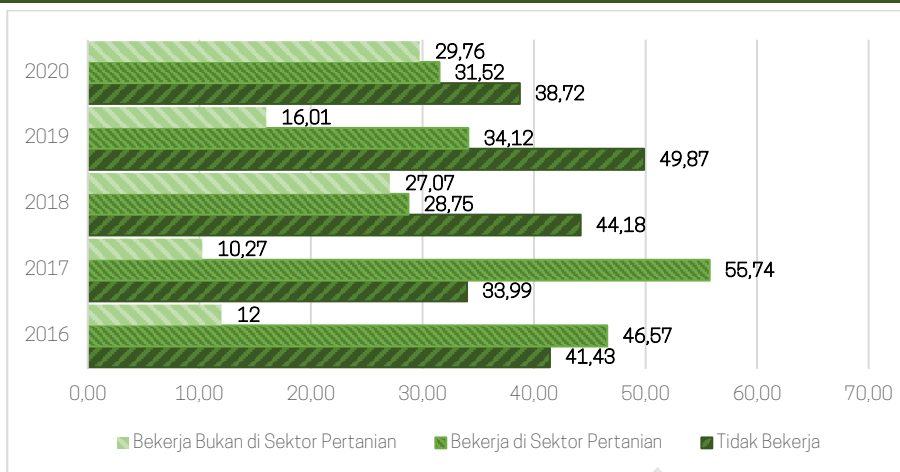
# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020



Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Informal dan Formal di Kabupaten Soppeng, 2016-2020  
Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Selain dibedakan ke dalam sektor formal dan informal, pekerjaan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan juga ke dalam sektor pekerjaan pertanian dan non pertanian. Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng masih banyak yang bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 31,52 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertanian lainnya. Persentase tersebut lebih banyak dibandingkan dengan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian, yang persentasenya mencapai 29,76 persen.

Berdasarkan Gambar 8, selama lima tahun terakhir penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng umumnya bekerja di sektor pertanian, hanya segelintir orang saja yang bekerja bukan di sektor pertanian yang angkanya tidak pernah lebih dari 30 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir. Meskipun cukup fluktuatif, jika dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2020 penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 46,57 persen menjadi 31,52 persen, meskipun sempat mengalami peningkatan selama pada tahun 2016-2017 dan 2018-2019.



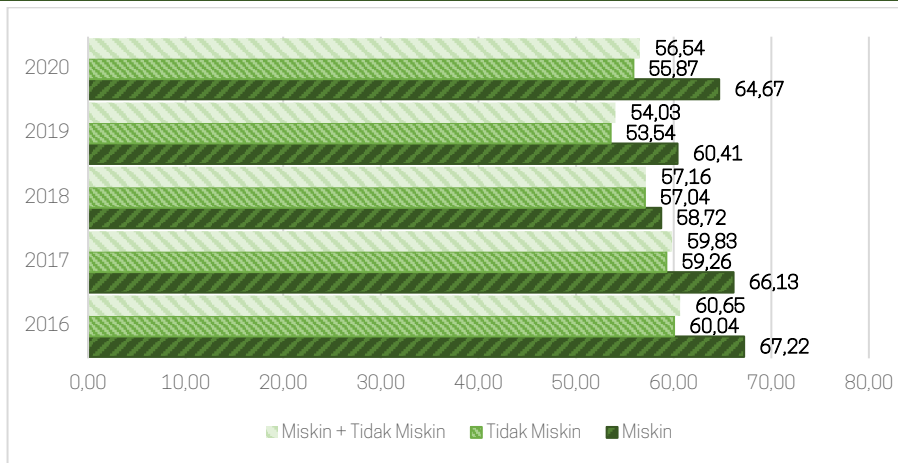
Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Pekerjaan Non Pertanian dan Pertanian di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

### 3.2.3 Pengeluaran per Kapita

Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti Ernest Engel, yang dikenal dengan hukum Engel, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan semakin kecil. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Dengan demikian, pangsa (*share*) pengeluaran makanan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat sehingga apabila pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik (Trisnowati dan Budiwinarto, 2013).

Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sebanyak 64,67 persen pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Persentase tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk tidak miskin untuk makanan yang hanya 55,87 persen. Hal serupa juga terjadi bila dilihat dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2016-2020 pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk miskin umumnya selalu lebih besar daripada pengeluaran per kapita untuk makanan dari penduduk tidak miskin.



Gambar 9. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

### 3.2.4 Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan dan akses infrastruktur publik akan berdampak luas terhadap pengembangan potensi dan produktivitas penduduk miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan melihat fasilitas jamban sendiri/bersama dan akses terhadap air bersih (Rusastra dan Napitupulu, 2007).

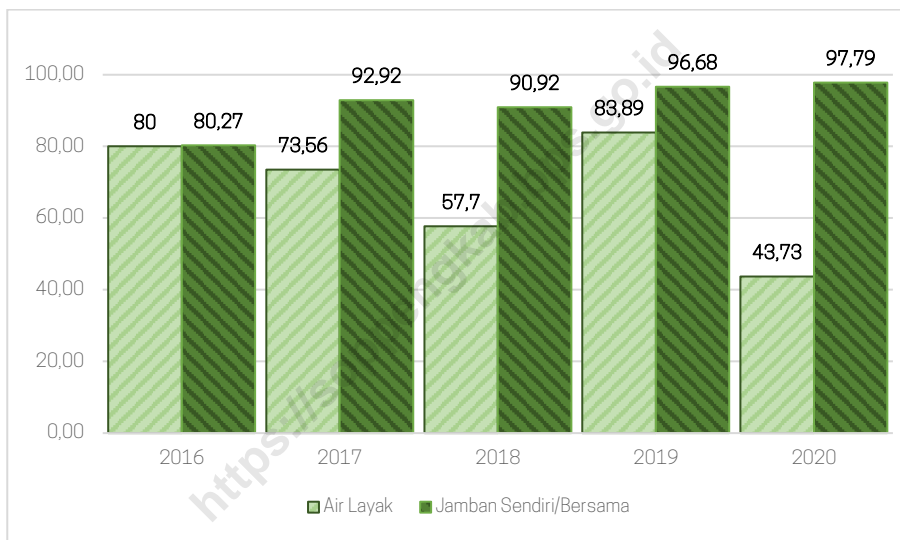
Dalam hal kelengkapan fasilitas rumah yang dilihat dari ketersediaan air layak, Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang persentase rumah tangga miskin pengguna air layaknya cukup tinggi yaitu hampir mencapai 50 persen. Berdasarkan Gambar 10 pada tahun 2020 tercatat 43,73 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng telah menggunakan air layak untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu apabila dilihat dari fasilitas jamban, diketahui bahwa 97,79 persen rumah tangga miskin telah menggunakan jamban sendiri/bersama. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, walaupun persentasenya sudah tinggi yaitu 96,98 persen.

Jika dilihat pada periode tahun 2016-2020 seperti yang terlihat pada Gambar 10, dapat diketahui bahwa baik penggunaan air layak maupun fasilitas jamban sendiri/bersama oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng sempat mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal yang berbeda terlihat pada penggunaan jamban sendiri/bersama oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng, persentasenya mencapai 97,79 persen pada tahun 2020. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

Haughton dan Khander (2009) mengatakan kelengkapan fasilitas rumah tangga seperti akses terhadap air layak dan sanitasi akan berpengaruh pada kesehatan anggota rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dilihat dari karakteristik sosial rumah tangga. Peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama selama lima tahun terakhir merupakan modal yang bagus dalam upaya perbaikan pola hidup sehat dalam rumah tangga miskin dan sudah tentu hal ini perlu didukung oleh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyediakan fasilitas air minum yang layak maupun jamban yang dapat diakses bersama bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.



Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Minum Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

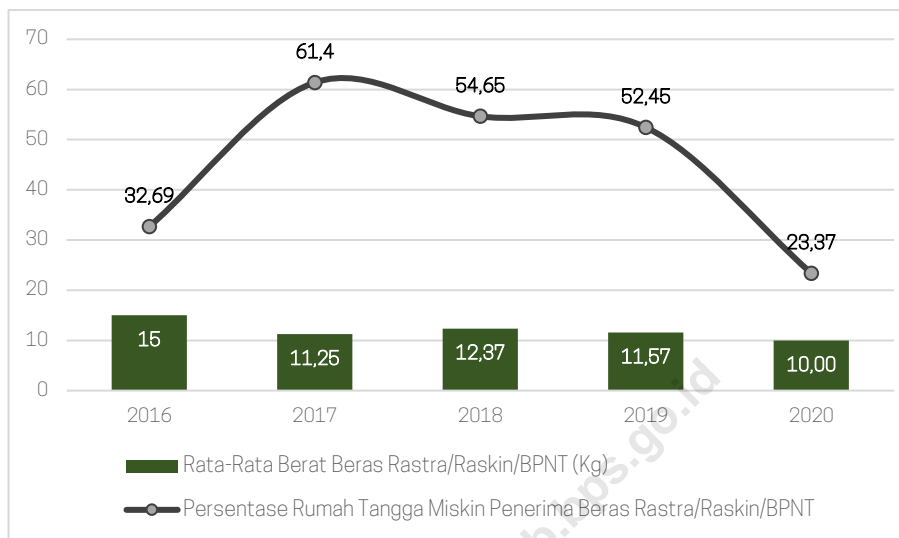
### 3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 23,37 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan rastra. Setiap rumah tangga miskin menerima rastra dengan berat rata-rata 10,00 kg.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam lima tahun terakhir seperti yang terlihat pada Gambar 11, persentase rumah tangga miskin penerima bantuan rastra di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan terutama sejak 2017 hingga 2020. Begitu juga dengan rata-rata berat rastra yang diperoleh, jika dibandingkan dengan tahun 2016, rata-rata berat rastra yang diperoleh menurun dari 15,00 kg menjadi 10,00 kg pada tahun 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Soppeng terutama

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

untuk menjaga agar bantuan rastra tersebut tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Soppeng.



Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Rastra/Raskin/BPNT dan Berat Rata-Rata Beras Rastra di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020



# BAB 4

## PENUTUP

file:///C:/Users/.../ppengkab.bps.go.id



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

## BAB 4 PENUTUP

Pada tahun 2020 masih terdapat sekitar 17,23 ribu jiwa atau sekitar 7,59 persen penduduk Kabupaten Soppeng yang tergolong miskin. Jika dilihat dari periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 19,12 ribu jiwa menjadi 17,23 ribu jiwa. Pada periode tahun tersebut, angka persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 8,45 persen menjadi 7,59 persen. Walaupun begitu, apabila dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 baik jumlah maupun persentase penduduk miskin, keduanya mengalami kenaikan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mencapai angka 0,83 poin pada tahun 2020. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mencapai angka 0,16 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

Profil rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2020 yang memiliki keterkaitan dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

1. Tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD/tamat SMP.
2. Seluruh penduduk miskin kelompok umur 15-24 sudah terbebas dari buta huruf, sedangkan penduduk miskin kelompok umur 15-55 tahun hampir semuanya terbebas dari buta huruf.
3. Angka partisipasi sekolah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng, baik kelompok umur 7-12 maupun 13-15 tahun telah mencapai mencapai 100 persen.
4. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020.
5. Sebagian besar pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan.

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

6. Pada tahun 2020, hampir setengah dari keseluruhan rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya dan hampir seluruh rumah tangga miskin mempunyai fasilitas jamban baik sendiri maupun bersama.
7. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga miskin penerima manfaat beras rastra/raskin/BPNT di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya sekitar seperempat dari keseluruhan rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan rastra dan rata-rata berat rastra yang diterima juga mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

<https://soppengkab.bps.go.id>



# DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2007). Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2020. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Cahyo, Agus Dwi. (2017). Peran Jarak Migrasi pada Model Pengaruh Karakteristik Demografi, Ekonomi, dan Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Migran yang Tinggal di Daerah Perkotaan di Indonesia [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington DC: World Bank.
- Irawan, Puguh Bodro, et al. (2017). Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar. Bogor: In Media.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rusastra, I Wayan dan Napitupulu, Togar A. (2007). Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Perdesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : 9-22.
- Suryawati, Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

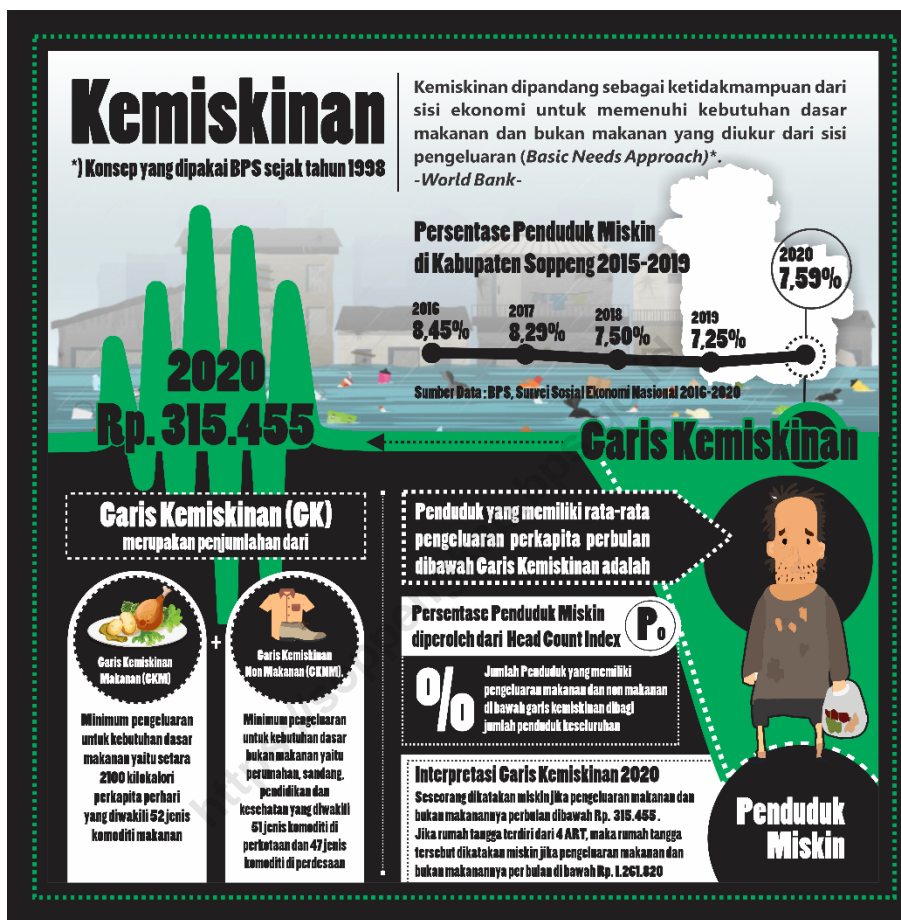


# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

Trisnowati, Juni dan Budiwinarto, Kim. (2013). Kajian Pengaruh Harga dan Pendapatan terhadap Proporsi Pengeluaran Makanan Rumah Tangga (Pendekatan Model Linier Permintaan Lengkap). Jurnal Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro: 123-134.

Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.

<https://soppengkab.bps.go.id>



Gambar 12.  
Sumber

Infografis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020  
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Garis Kemiskinan (Rp per Kapita per Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	19,12	8,45	1,73	0,50	220.192
2017	18,76	8,29	1,25	0,28	225.936
2018	17,00	7,50	1,39	0,37	253.457
2019	16,45	7,25	0,69	0,12	297.546
2020	17,23	7,59	0,83	0,16	316.455

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Pendidikan yang Ditamatkan		
	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SMP	SMA+
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	49,22	40,54	10,24
2017	42,03	50,82	7,15
2018	46,53	45,78	7,68
2019	45,62	45,43	8,95
2020	34,06	45,42	20,52

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 3. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-24 Tahun	15-65 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	97,16	87,66	92,53	100,00
2017	100,00	95,84	100,00	67,40
2018	90,17	92,68	100,00	85,59
2019	100,00	95,11	100,00	100,00
2020	100,00	91,65	100,00	100,00

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Status Bekerja		
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	41,43	56,36	2,21
2017	33,99	61,14	4,87
2018	44,18	43,61	12,20
2019	49,87	43,34	6,79
2020	38,72	32,76	28,52

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Sektor Pekerjaan		
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	41,43	46,57	12,00
2017	33,99	55,74	10,27
2018	44,18	28,75	27,07
2019	49,87	34,12	16,01
2020	38,72	31,52	29,76

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 6. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Status Miskin		
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	67,22	60,04	60,65
2017	66,13	59,26	59,83
2018	58,72	57,04	57,16
2019	60,41	53,54	54,03
2020	64,67	55,87	56,54

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
2016	80,00	80,27
2017	73,56	92,92
2018	57,70	90,92
2019	83,89	96,68
2020	43,47	97,79

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Rastra/Raskin/BPNT dan Rata-Rata Berat Beras Rastra/Raskin/BPNT yang Diterima di Kabupaten Soppeng, 2016-2020

Tahun	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Rastra/Raskin/BPNT	Rata-Rata Berat Rastra/Raskin/BPNT yang Diterima
(1)	(2)	(3)
2016	32,69	15,00
2017	61,40	11,25
2018	54,65	12,37
2019	52,45	11,57
2020	23,37	10,00

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020



# DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG 2020

<https://soppengkab.bps.go.id>

# DATA

## Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Salotungo No. 127, 90812 Watansoppeng Sulawesi Selatan,  
Telp (0484) 21060, Faks (0484) 23377, Mailbox : [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)